

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN (STUDI KASUS PASAR NEGARA)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH

AINA SAFITRI

NPM : 2022172

SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)

AMUNTAI

2025

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : AINA SAFITRI

NPM : 2022172

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL :

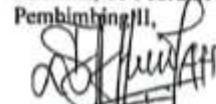
**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN PASAR DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI SELATAN (STUDI KASUS PASAR
NEGARA)** setelah diteliti dan diadakan perbaikan
seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan
dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah
Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,


Dr. Reno Affriani, S.Sos, M.A.P
NUPTK. 3357767668130243

Amuntai, 10 Februari 2026

Pembimbing II,


Sri Agusmita Heglinda, S.Pd, M.A.P
NUPTK. 1635759660230280

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIK. 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil alamin, tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain puji dan syukur bagi Allah Subhanahu Wata'ala pencipta alam semesta penulis panjatkan kehadiran-Nya, semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan, beserta keluarga. Proposal Skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)” di ajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana S1 pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pada kesempatan ini tak lupa juga penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai dan Selaku dosen pembimbing I yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah banyak membina kelancaran proses studi.
3. Ibu Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd, M.AP. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan pengarahan dan petunjuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan dengan baik.
4. Seluruh Dosen beserta staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

5. Seluruh staf tata usaha beserta jajarannya yang ada di UPTD Pengelola Pasar Negara Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Kedua orang tua tercinta yang telah memberikan segala kasih sayangya kepada penulis, berupa besarnya perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus terhadap penulis, sehingga termotivasi dan menyelesaikan pembuatan proposal skripsi ini.
7. Seluruh responden yang membantu dalam memberikan informasinya pada penulis.
8. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi yang berkepentingan. Kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal ini.

Amuntai, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	4
C. Rumusan Masalah	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu	6
B. Tinjauan Teoritis	10
1. Kebijakan Publik	10
2. Implementasi	14
3. Pengelolaan Pasar	24
C. Kerangka Pemikiran.....	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Tipe Penelitian	32
D. Data Dan Sumber Data.....	33
E. Desain Operasional Penelitian	34
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37
H. Uji Kreadibilitas Data.....	38

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Desain Operasional Penelitian	36
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	30
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perekonomian suatu negara tidak dapat dilepaskan dari aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Aktivitas ekonomi yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat adalah kegiatan jual beli di pasar. Pasar merupakan sarana vital yang mempertemukan penjual dan pembeli dalam transaksi barang dan jasa, sehingga keberadaannya menjadi pusat distribusi dan roda penggerak ekonomi rakyat. Dalam perkembangannya, pasar bukan hanya sekadar tempat bertemunya kepentingan ekonomi, tetapi juga ruang interaksi sosial dan bagian dari tradisi budaya masyarakat. Dengan demikian, pasar memiliki fungsi yang sangat penting, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya.

Di Indonesia, pasar tradisional masih memegang peranan yang sangat signifikan dalam menopang perekonomian. Sebagian besar masyarakat Indonesia masih termasuk dalam kelompok berpenghasilan menengah ke bawah, sehingga pasar tradisional menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dengan harga yang relatif terjangkau. Keberadaan pasar tradisional tidak hanya bermanfaat bagi konsumen, tetapi juga memberikan lapangan kerja dan sumber pendapatan bagi pedagang kecil, buruh angkut, tukang parkir, hingga penyedia jasa transportasi di sekitar pasar. Dengan demikian, keberlangsungan pasar tradisional perlu dijaga agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penopang ekonomi rakyat.

Pemerintah pun menyadari pentingnya menjaga keberadaan pasar tradisional. Hal ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satunya adalah adanya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 3 huruf c yang mengatur tentang penataan, penertiban, dan pengamanan pasar. Pengelolaan pasar yang tertib, bersih, dan profesional akan menciptakan kenyamanan bagi para pedagang maupun pembeli, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran pemerintah dalam menyediakan ruang ekonomi rakyat yang layak.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki pasar tradisional yang berperan penting dalam mendukung perekonomian masyarakat. Salah satu pasar yang paling menonjol adalah Pasar Negara yang terletak di kecamatan Daha Selatan. Pasar Negara merupakan pusat perdagangan terbesar pasar di wilayah tiga kecamatan Daha (Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan). Setiap harinya, pasar ini ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan pokok. Selain menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli, Pasar Negara juga menjadi sumber penghidupan bagi pedagang kecil, buruh angkut, tukang parkir, serta penyedia jasa transportasi seperti ojek dan bentor.

Namun dalam pengelolaannya, terdapat berbagai permasalahan seperti ketidaktertiban pedagang dalam menempatkan lokasi dagangannya, penggunaan bahu jalan sebagai area parkir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan yang berlaku, dan kurangnya ketegasan para petugas pasar dalam mengelola pasar.

Berdasarkan hasil observasi awal yang penulis lakukan diketahui bahwa ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam retribusi pelayanan pasar di Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan :

1. Banyak pedagang yang meletakkan dagangannya dan memasang terpal/tenda hingga ke bahu jalan, sehingga penataan menjadi tidak rapi dan menghalangi kenyamanan pembeli saat beraktivitas. Kondisi ini melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) huruf l yang berbunyi "Meletakkan dan/atau menimbun barang yang menyebabkan terganggunya aktivitas pasar", serta Pasal 27 ayat (2) huruf s yang berbunyi "Memasang terpal/tenda secara semrawut".
2. Terdapat petugas retribusi pelayanan toko yang sudah menegur pedagang liar, tetapi tegurannya tidak tegas dan hanya sebatas peringatan ringan, padahal seharusnya melarang mereka agar tidak berjualan di depan toko milik orang lain, namun tetap meminta uang retribusi dari pedagang tersebut.
3. Tidak tersedianya tempat khusus sebagai pangkalan angkutan umum seperti ojek dan bentor menyebabkan ojek dan bentor menunggu penumpang di bahu jalan, sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)”**.

B. Fokus Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan tersebut, agar penelitian lebih terarah dan mengenai sasaran yang diharapkan, Fokus Penelitian di sini dimaksudkan untuk mempertegas ruang lingkup masalah yang akan dibahas.

Berdasarkan uraian yang penulis jabarkan pada latar belakang diatas maka fokus penelitian yang penulis ambil untuk diteliti sesuai teori implementasi kebijakan menurut Teori George C. Edwards III dalam buku Herabudin (2016:127), yaitu:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara) ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara).
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara).

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik khususnya terkait di bidang implementasi kebijakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pemerintah, khususnya Pemerintah Kecamatan Daha Selatan dan pengelola/pelaksana tugas tentang pentingnya memahami implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Rizkah Amelia (2020) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah (Studi Kasus Pada Pasar Ikan Banua Lima) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara serta faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif-kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diambil melalui penarikan sampel secara *purposive sampling* berjumlah 12 orang. Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dan uji kredibilitas data. Hasil penelitiannya menunjukkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum optimal yakni: Pertama, sub variabel komunikasi di ketahui indikator transmisi cukup baik karena UPT Pasar sudah menyampaikan peraturan

kepada masyarakat, indikator kejelasan belum baik karena pedagang dan pembeli belum memahami kebijakan yang ada, indikator konsisten cukup baik karena pelaksanaan pengelolaan pasar cukup konsisten. Kedua, sub variabel sumber daya di ketahui indikator staf cukup baik karena ada staf ahli yang lebih memahami kebijakan tersebut, indikator informasi cukup baik karena di sampaikan secara langsung oleh UPT Pasar, indikator wewenang cukup baik karena dilakukan oleh UPT Pasar, dan indikator fasilitas belum baik karena fasilitas yang ada belum tersedia dengan baik. Ketiga, sub variabel disposisi di ketahui indikator pengangkatan birokrasi cukup baik karena di serahkan kepada UPT Pasar, dan indikator insentif belum baik karena tidak ada insentif yang di berikan untuk orang-orang yang terlibat. Keempat, sub variabel struktur birokrasi di ketahui indikator SOP cukup baik karena kegiatan Pasar Ikan Banua Lima sesuai dengan SOP yang ada, dan indikator fragmentasi cukup baik karena sudah terlaksana dengan arahan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi dua yaitu: Pertama, faktor pendukung terdiri dari koordinasi yang baik antar badan pelaksana seperti tanggung jawab UPT pasar terhadap Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM. Kedua, faktor penghambat terdiri dari kurangnya kejelasan kebijakan sebab tidak ada penyampaian peraturan secara menyeluruh, dan kurangnya tindakan tegas terhadap pelanggaran di pasar seperti tidak ada tindakan tegas kepada kendaraan yang masuk kedalam pasar. Untuk meningkatkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah di Pasar Ikan Banua Lima di

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka disarankan kepada Kepala UPT Pasar lebih memperhatikan lagi sarana dan prasarana serta lebih tegas dalam menindak pelanggaran di Pasar Ikan Banua Lima. Kepada pedagang hendaknya menggali atau mencari informasi yang lebih dalam lagi tentang peraturan-peraturan yang ada pada pasar. Dan kepada pembeli tidak membawa kendaraan masuk kedalam pasar, serta tidak melakukan tindak-tanduk yang dapat mengganggu aktivitas pasar.

2. Muhammad Wahyudin (2022) Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Pasar Senin Desa Pasar Senin Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus: Pasar Senin Desa Pasar Senin)”**. Tujuan peneliti ini untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pasar Pemerintah Di Pasar Senin Desa Pasar Senin Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan pemakaian sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu *Sampling Snowball* sebanyak 13 orang dengan teknik analisa data, mencatat hasil catatan lapangan, mengumpulkan dan memilah-milah, berfikir dan uji kreadibilitas data Perpanjangan Pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, mengadakan membercheck.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum efektif, antara lain: Pertama, kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan pasar belum maksimal dari segi kebersihan, kehygienisan makanan. Kedua, pelaksanaan pengelola pasar terkait pemantauan pasar kurang. Ketiga, kurangnya informasi dari pengelola pasar terhadap pedagang dan masyarakat. Keempat, pasar tidak terurus dan diperhatikan karena kurangnya sosialisasi. Kelima, dukungan dari segi sarana dan prasarana sangat kurang. Keenam, keamanan yang ada dipasar kurang optimal dikarenakan personil petugas yang masih kurang. Ketujuh, SOP (Standar Operasional) belum berjalan karena banyaknya pelanggaran. Kedelapan, sasaran kebijakannya pun menurut UU No 17 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan pasar belum optimal karena masih banyak pelanggar aturan Undang-undang dan SOP terkait pengelolaan pasar yang ada di Desa Pasar Senin. Saran dari penulis kepada pengelola pasar terutama dari segi koordinasi terhadap pedagang dan masyarakat diharapkan lebih ditingkatkan lagi guna tercapainya pasar yang selalu berkembang dan kepada pedagang diharapkan agar selalu berkoordinasi dan memberikan informasi kepada pihak terkait yaitu pengelola pasar dikarenakan informasi dari para pedagang sangat amat penting dan sangat dibutuhkan oleh pengelola pasar yang ada di Pasar Senin serta dukungan dari masyarakat apapun kebijakan pengelola pasar selama kebijakan dari pihak pengelola pasar itu membangun dan membawa dampak positif untuk perkembangan pasar yang ada di Desa Pasar Senin dengan adanya dukungan penuh dari masyarakat terutama

masyarakat sekitaran Pasar Senin maka akan membawa dampak positif kepada pihak pengelola pasar dan pasar itu sendiri.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy* memang biasanya dikaitkan dengan keputusan pemerintah karena pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggung jawab melayani kepentingan umum (Said Zainal Abidin, 2016:3). Jadi kebijakan adalah keputusan yang berasal dari pemerintah untuk menyelesaikan kepentingan umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah rangkaian konsep untuk menyelesaikan beberapa permasalahan.

Kebijakan merupakan suatu tindakan berpola yang mengarah pada suatu tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Wahab, 2005:3). Sementara itu, Soenarko (2000:35), mengutip pendapatnya Woyowasito dan Purwodarminto, menjelaskan bahwa kebijakan itu menunjukkan adanya kemampuan atau kualitas yang dimiliki seseorang dalam keadaannya yang *learned* (terpelajar), *prudent* (baik) dan *experient* (berpengalaman), yang berarti bahwa kebijakan adalah *skill* (keterampilan), *ability*

(kemampuan), *capability* (kecakapan), dan *insight* (kemampuan untuk memahami sesuatu).

Disisi lain, kebijakan juga diartikan sebagai "*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*" (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilakukan oleh seorang atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu) (Anderson, 2002:12). Suatu kebijakan dibuat dalam rangka untuk memberikan solusi terhadap persoalan yang sedang terjadi. Di samping itu, kebijakan menjadi pemecahan masalah yang timbul dilingkungan masyarakat. Kebijakan mempunyai tujuan menyelesaikan persoalan yang ada secara tuntas, bukan menyelesaikan persoalan dengan menimbulkan persoalan baru, tetapi dengan adanya kebijakan permasalahan yang ada terselesaikan; menjadi solusi atas permasalahan tersebut.

Donavan dan Jack Son (2004:55), mengutip pendapatnya Graycar, mengemukakan bahwa kebijakan dapat dilihat sebagai konsep, filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai kerangka kerja. Sebagai konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai cara; melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam

mencapai produknya. Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Fredrich, yang dikutip oleh Soenarko (2000:40), memberikan definisi yang berbeda, bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini kita anggap tepat karena memusatkan perhatian pada yang sebenarnya dilakukan dan bukan apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan atau keputusan yang merupakan pilihan diantara berbagai alternatif yang ada (Budi Winarto, 2014:21).

b. Tahap-tahap Kebijakan

Menurut William Dunn N Dunn dalam (Siti Marwiyah, 2022:14-16) tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut.

1) Penyusunan Agenda

Penyusunan agenda merupakan sebuah proses yang sangat strategis dalam realitas dalam mengatur kebijakan publik. Dalam proses inilah ada didalam ruang untuk melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat

dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan sering disebut juga sebagai masalah kebijakan publik, biasanya muncul karena telah terjadi saling berpendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang sudah selesai atau akan ditempuh mengenai karakter permasalahan tersebut. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Issue kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Policy Issues biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut.

2) Formulasi Kebijakan (Policy Formulating)

Formulasi kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan, setelah itu masalah didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat di pilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi ialah memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat di atur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sudah direncanakan harus didukung. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi symbol itu namun dimana melalui proses bagi warga negara belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan kebijakan yang telah diambil dan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia.

5) Evaluasi Kebijakan/Penilaian

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Implementasi

a. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nurdin Usman dalam (Ermanovida et al,2021:45) implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai suatu kegiatan.

Menurut Zainal Abidin dalam (Deddy Mulyadi, 2016:26) Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama, faktor utama internal dan faktor eksternal. Faktor utama internal merupakan kebijakan yang diimplementasikan, sedangkan faktor utama eksternal adalah kondisi lingkungan dan pihak-pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses implementasi karena yang diimplementasikan adalah kebijakan itu sendiri. Pada tingkat pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas dan ketetapan strategi implementasi.

Menurut Grindie dalam (Syahrudin, 2019:28) mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Jadi, bisa disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran

kebijakan itu sendiri. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

b. Model-model Implementasi Kebijakan

1) Teori Donald Van Metter Dan Carl Van Horn

Menurut Van Metter dan Van Horn dalam buku Leo Agustino (2014:141-144) ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan, yakni:

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

b) Sumberdaya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumberdaya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan. Tetapi diluar sumberdaya manusia, sumberdaya-sumberdaya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumberdaya finansial dan sumberdaya waktu. Karena, mau tidak mau, ketika sumberdaya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumberdaya waktu. Saat sumberdaya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakterhasilan implementasi

kebijakan. Karena itu sumberdaya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumberdaya tersebut.

c) Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tindakan manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum. Sedangkan bila kebijakan publik itu tidak terlalu merubah perilaku dasar manusia, maka dapat-dapat saja agen pelaksana yang diturunkan tidak sekeras dan tidak setegas pada gambaran yang pertama. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

d) Sikap/Kecendrungan (*Disposition*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan "dari atas" (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan, Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik, semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terkait dalam satu proses implementasi.

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan, begitu pula sebaliknya.

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

2) Teori Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S Grindle, dalam buku Irawaty Igrisa (2022:69-70) dipengaruhi oleh dua variabel besar yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Variabel isi kebijakan ini mencakup: yang mana hal ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

- a) Kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan;
- b) Jenis manfaat yang diterima oleh target groups;
- c) Perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d) Ketepatan letak sebuah program;
- e) Sebuah kebijakan menyebutkan aparat
- f) pelaksanaanya dengan rinci, dan
- g) Sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a) Kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- b) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa,
- c) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

3) Daniel Mazmania dan Paul A. Sabatier

Model ini disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Mazmania dan Sabatier (Sahya Anggara, 2014:268-269) berpendapat bahwa

peran penting dari analisis implementasi kebijaksanaan negara adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang memengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, antara lain sebagai berikut.

- a) Mudah-tidaknya masalah yang akan dikendalikan, mencakup:
 - (1) Kesukaran teknis;
 - (2) Keragaman perilaku kelompok sasaran;
 - (3) Persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk;
 - (4) Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
- b) Kemampuan keputusan kebijaksanaan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasinya, mencakup:
 - (1) Kejelasan dan konsistensi tujuan;
 - (2) Digunakan teori kausal yang memadai
 - (3) Ketepatan alokasi sumber dana;
 - (4) Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana;
 - (5) Rekrutmen pejabat pelaksana;
 - (6) Akses formal pihak luar.
- c) Pengaruh langsung berbagai variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam keputusan kebijaksanaan tersebut, mencakup:
 - (1) Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi;
 - (2) Dukungan publik
 - (3) Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok
 - (4) Dukungan dari pejabat atasan;
 - (5) Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana.

Tahap-tahap dalam proses implementasi, yaitu:

 - (1) *output* kebijaksanaan badan-badan pelaksana;
 - (2) kesediaan kelompok kebijaksanaan; sasaran mematuhi *output*;
 - (3) dampak nyata *output* kebijaksanaan;
 - (4) dampak *output* kebijaksanaan sebagai dipersasi;
 - (5) perbaikan mendasar dalam undang-undang.

4) Teori Brian W. Hogwood dan Lewis A Gun

Hogwood and Gun adalah seorang penulis Inggris yang sangat membela pandangannya tentang pentingnya pendekatan

top-down untuk proses implementasi. Bagi mereka, pendekatan bottom-up yang cenderung menangani masalah implementasi berdasarkan kasus per kasus tidak menarik karena pembuat kebijakan adalah individu yang dipilih secara demokratis dan pandangan mereka tentang implementasi tidak melanggar demokrasi.

Ide dasar mereka berasal dari publikasi Gun tahun 1978 yang menyelidiki penyebab kegagalan implementasi. Publikasi ini sedang dikembangkan dengan karyanya yang berjudul “Policy Analysis for the Real World” Di dalam tulisan tersebut memberikan proporsi untuk mencapai implementasi yang sempurna bagi para pembuat kebijakan dalam buku Dian Suluh Kusuma Dewi (2022:134-135) antara lain sebagai berikut:

- a) Situasi di luar lembaga atau organisasi pelaksana tidak secara serius menghambat proses implementasi.
- b) Waktu dan sumber daya yang cukup tersedia untuk mengimplementasikan program.
- c) Tidak ada batasan dalam penyediaan semua sumber daya yang Anda butuhkan, termasuk sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap tahapan dalam proses implementasi.
- d) Kebijakan yang diterapkan didasarkan pada teori kausal atau sebab akibat yang valid.
- e) Hubungan sebab akibat bersifat langsung dan sesedikit mungkin ada hubungan antara atau intervening variabel.

- f) Diimplementasikan oleh satu lembaga yang terlibat hubungan kelembagaan ketergantungan sangat rendah.
- g) Adanya pemahaman yang utuh dan konsistensi antara tujuan yang ingin dicapai dan kondisi ini harus ada sepanjang proses implementasi.
- h) Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, untuk mensignifikasikan tugas yang harus dilaksanakan oleh pihak-pihak yang turut terlibat dalam urutan langkah-langkah pelaksanaan secara lengkap, detail dan sempurna.

5) Teori Menurut Charles O. Jones

Menurut Jones dalam buku Leo Agustino (2016:154-155) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

- a) Organisasi: Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
- b) Interpretasi: Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahannya yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c) Penerapan: Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Secara lebih rinci mengenai organisasi, interpretasi (interpretation), dan penerapan (applications), penulis memaknainya sebagai berikut. Pertama, aktivitas pengorganisasian (organization) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Kedua, aktivitas interpretasi (interpretation) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Terakhir, ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana implementasi merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

6) Teori Georgi C. Edward III

Dalam pandangan George C. Edward III dalam buku Herabudin (2016:127-131) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

b) Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut Wahab (2010), sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi

Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

d) Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle dalam Agustino (2008:192) menyatakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu:

- 1) Isi Kebijakan (content of policy)
Variabel isi kebijakan mencakup sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan, Jenis manfaat yang diterima oleh target group, Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Apakah letak dari sebuah program sudah tepat, Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci dan Apakah sebuah program di dukung oleh sumber daya manusia.
- 2) Lingkungan Implementasi (conteks of policy)
Variabel lingkungan kebijakan mencakup seberapa besar kekuasaan, kepentingan, strategi yang dimiliki para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa dan Tingkat kepatuhan dan responsivitas sasaran.

Sedangkan menurut Mazmanian dan Sebastier dalam Agustino, (2008: 196) terdapat tiga kelompok variabel yang berpengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan yaitu:

- 1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problem)
Kelompok variabel karakteristik masalah mencakup: a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan; b) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran; c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi; dan d).Cakupan perubahan perilaku yang diinginkan.
- 2) Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)
Kelompok variabel karakteristik kebijakan/ undang-undang mencakup: a) Kejelasan isi kebijakan; b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis; c) Besarnya alokasi sumber daya finansial terhadap kebijakan tersebut; d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana; e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana; f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan; dan g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
- 3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation).
Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi; b) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan; c) Sikap dari kelompok pemilih; dan d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementator.

3. Pengelolaan Pasar

a. Definisi Pengelolaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2016) pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Nugroho (2003:119) mengemukakan bahwa pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan menurut Syamsu menitik beratkan pengelolaan sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengontrolan untuk mencapai efisiensi pekerjaan.

Menurut Usman (2006 : 34) menyatakan tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

b. Pengertian Pasar

Pasar adalah sekumpulan pembeli dan penjual melalui interaksi mereka yang nyata atau potensial, menetapkan harga suatu produk atau sekumpulan produk, dengan demikian kita dapat memandang pasar sebagai tempat di mana harga ditetapkan. Secara sederhana pasar dapat diartikan sebagai tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Pengertian ini mengandung arti pasar memiliki tempat atau lokasi tertentu sehingga memungkinkan pembeli dan penjual bertemu. Di dalam pasar terdapat penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa.

Menurut Assauri (2011 : 99) menyatakan pasar merupakan area pertukaran potensial baik dalam bentuk fisik sebagai tempat berkumpul atau bertemunya antara penjual dan pembeli, maupun tidak yang berbentuk fisik, yang memungkinkan terlaksananya pertukaran, karena terpenuhinya syarat pertukaran, yaitu minat dan citra serta daya beli. Stanton (1993) mengatakan bahwa pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Simamora (2006). Menurutnya, pasar adalah kelompok masyarakat dengan kebutuhan dan keinginannya untuk memiliki atau membeli barang tertentu. Bukan hanya itu, mereka juga punya kemampuan beli

terhadap produk tersebut. Kesempatan tukar-menukar barang dengan alat pembayaran pun ada di dalam pasar.

Sedangkan Kotler dan Amstrong (2016) mengatakan bahwa pasar adalah pertemuan antara para pembeli yang potensial dan juga penjual yang menawarkan produk atau jasa. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pasar ada tempat sekumpulan pembeli dan penjual yang berinteraksi untuk melakukan transaksi jual beli produk, baik barang maupun jasa, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.

c. Pengelolaan Pasar Daerah

- 1) Pengertian Pengelolaan Pasar Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pasar Daerah “merupakan pedoman, baik bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku pengelola maupun para pihak yang terkait dengan pemakaian tempat berjualan dipasar maupun ditempat-tempat tertentu yang diizinkan serta para Investor yang akan melakukan kerja sama dalam pembangunan dan pengelolaan”. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pengelolaan Pasar Daerah sangat diperlukan sebagai Dasar Hukum penyelenggaraan, pengaturan dan pengembangan pasar dan tempat berjualan pedagang, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas manfaat, adil dan merata serta memberdayakan perekonomian masyarakat. Pengelolaan pasar bertujuan untuk menciptakan, memperluas dan

memeratakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memanfaatkan sumber daya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat dan memberikan kesempatan kepada masyarakat atau Badan dalam mengelola atau memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah.

2) Tujuan Pengelolaan Pasar Daerah

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan pasar Daerah Hulu Sungai Selatan; Pengelolaan pasar bertujuan menata, membina, mengawasi, membangun, dan mengevaluasi kegiatan perdagangan serta prasarana untuk:

- a) Menciptakan, memperluas dan pemerata kesempatan kerja di bidang perdagangan;
- b) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
- c) Memanfaatkan sumberdaya milik Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- d) Memberikan kesempatan kepada masyarakat atau badan dalam mengelola dan memanfaatkan pasar untuk kemajuan daerah;
- e) Mempertahankan, menjaga dan melestarikan pasar sesuai peran dan fungsinya sebagai lembaga ketahanan ekonomi, sosial dan budaya; dan
- f) Mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan proses memilih aspek-aspek dalam tinjauan teori yang berhubungan dengan masalah penelitian. Penelitian ini dilakukan pada Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seperti yang telah diuraikan dalam Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Pasar Negara). Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai (Studi Kasus Pasar Negara) agar tidak melebar dari pembahasan penelitian ini memfokuskan pada Dalam Pandangan Edward III dalam buku Herabudin (2016:127) ada empat faktor yang terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

1. Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implementasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut Wahab (2010), sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

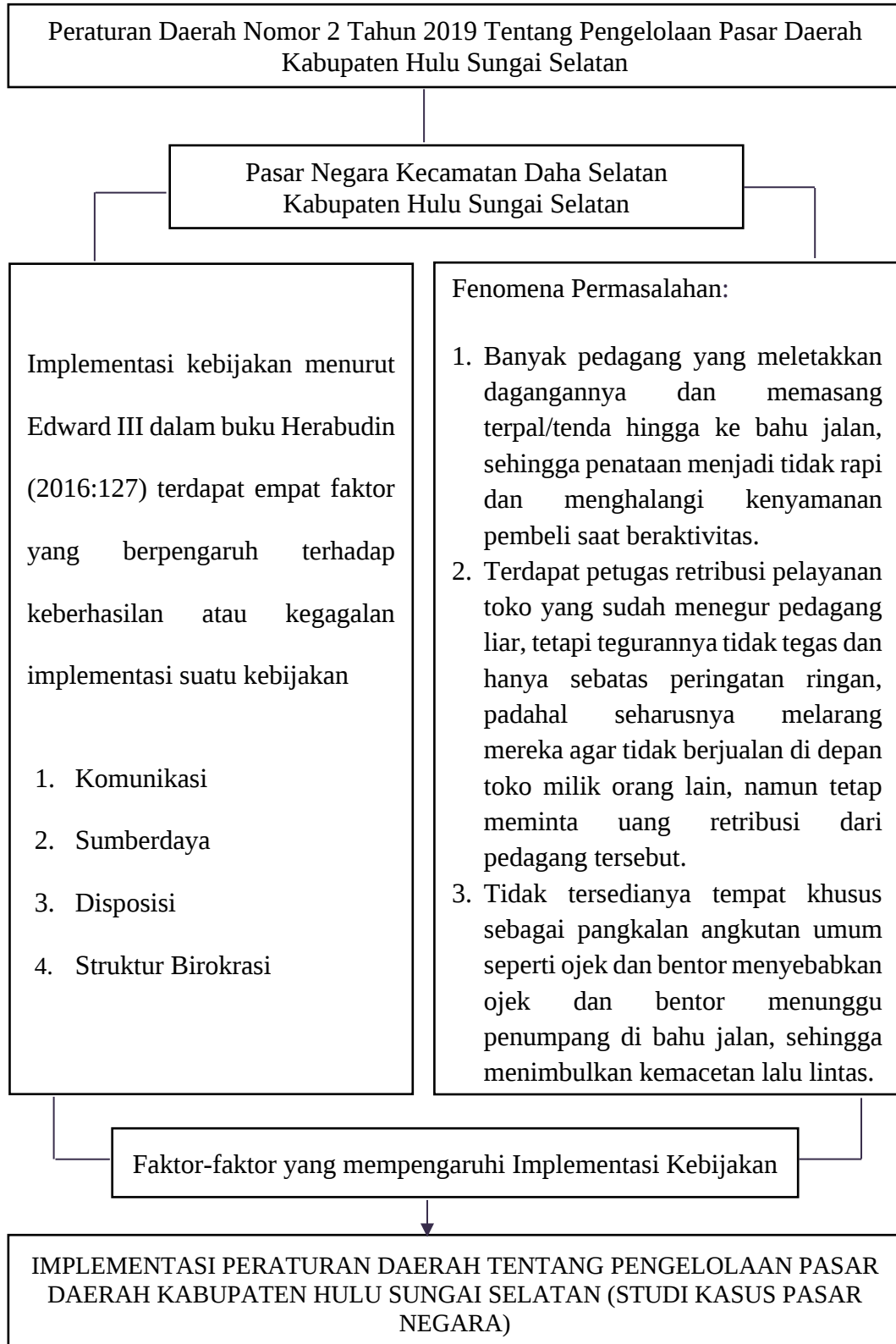
4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini pada Pasar Negara Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang beralamat Jl. Kamasan, Desa Bayanan, Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dimaksud peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisis data serta mendeskripsikan dan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)", dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor (Sujarweni, 2020:19), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

Aspek kualitatif dari pendekatan ini adalah menspesifikasi metode para subjek untuk mengartikulasikan dan memahami realitas dalam domain

pengalaman tertentu. Penelitian kualitatif pada hakekatnya mengamati objek (responden) secara langsung kegiatan yang mereka lakukan, berinteraksi dengan mereka, dan berusaha menyalami kehidupan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat partisipasi dan wawancara mendalam. (Ajat Rukajat, 2018:5).

C. Tipe Penelitian

Penelitian merupakan proses yang panjang. Penelitian berawal dari minat yang ada dalam diri seseorang dalam memahami fenomena tertentu yang kemudian berkembang menjadi ide, teori, dan konsep. Tipe penelitian berfungsi untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh objek penelitian dengan cara mendeskripsikan melalui pernyataan-pernyataan dengan menggunakan berbagai metode ilmiah.

Pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran, atau penjelasan tentang "Implementasi Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Studi Kasus Pasar Negara)" secara sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakikatnya mencari pemahaman observasi.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh dari informan secara langsung melalui wawancara yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti, dan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian atau objek yang diteliti untuk mempermudah dan memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh ini disebut data primer yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

b. Data Sekunder

Yaitu Penelitian dengan pengumpulan data ini peneliti mempelajari buku-buku atau referensi, dokumen-dokumen maupun catatan-catatan tertulis yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan digunakan sebagai pendukung dalam analisa data yaitu Dokumentasi, yakni teknik memperoleh data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian sistematis, padu dan utuh. (Sandu Siyoto, 2015:67)

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data di dapat atau di peroleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara

dalam pengumpulan datanya, maka sumber data di sebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Dalam menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

Informan penelitian ini berasal dari pegawai UPTD Pengelola Pasar Negara Hulu Sungai Selatan dan beberapa masyarakat yang terdiri dari 10 informan.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian adalah sebagai alat bantu atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis sehingga lebih memudahkan.

Menurut Edward III dalam buku Herabudin (2016:127):

1. Komunikasi

Untuk mencapai keberhasilan, implemetasi kebijakan pemerintah mensyaratkan agar implementor mengetahui hal yang harus dilakukan secara jelas. Tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi

implementasi. Apabila penyampaian tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas, tidak memberikan pemahaman, atau tujuan dan sasaran kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, kemungkinan terjadi penolakan atau resistensi dari kelompok sasaran sangat besar.

2. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya, baik sumber daya manusia, materi maupun metode. Sasaran, tujuan, dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, apabila implementor kekurangan sumber daya untuk pelaksanaan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Menurut Wahab (2010), sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

3. Disposisi

Wahab (2010) menjelaskan bahwa disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, ia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi kebijakan, struktur organisasi mempunyai peranan penting. Salah satu aspek struktur organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures/SOP*), yaitu

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yaitu birokrasi yang rumit dan kompleks, serta ini menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Desain operasional penelitian merupakan variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Desain operasional penelitian yang disajikan peneliti dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Implementasi Kebijakan menurut Edward III dalam buku Herabudin (2016:127)	1. Komunikasi	a. Transmisi (penyaluran) b. Kejelasan Komunikasi c. Konsistensi Komunikasi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Fasilitas
	3. Disposisi	a. Sikap Pelaksana b. Intensif
	4. Struktur Birokrasi	a. SOP

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu teknik yang digunakan secara langsung pada objek untuk mendapatkan data dengan terlibat, mengamati fenomena yang terjadi dan mencatat mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan implementasi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Wawancara

Yaitu teknik penggalan data yang penulis lakukan dengan cara wawancara bebas responden dan informan untuk melengkapi data yang dicari melalui teknik lainnya.

3. Dokumentasi

Penelitian menggunakan data-data dengan cara menggunakan bahan-bahan tertulis sebagai dokumen seperti buku-buku dan sumber-sumber tertulis lainnya. Adapun bahan dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal, naskah dokumen pemerintah daerah, naskah peraturan perundang-undangan serta pernyataan yang penulis anggap berkaitan dengan masalah penelitian ini. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, dan agenda.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang saling menjalin merupakan proses siklus interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejarak yang membangun wawasan umum yang disebut "analisis" (Haris Herdiansyah, 2010).

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Kondensasi Data

Kondensasi data adalah kegiatan merangkum, memilih, atau menyerhanakan data mendekati keseluruhan bagian dari catatan-catatan yang didapatkan. Kondensasi data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan merangkum data temuan yang terkait dengan judul penelitian baik dari hasil observasi, wawancara maupun dokumen-dokumen.

2. Penyajian Data

Penulis menyajikan data dalam bentuk deskriptif atau pemaparan, dimaksudkan untuk memudahkan dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian yang dilakukan.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam proses analisis data adalah menarik kesimpulan berdasarkan penelitian dan melakukan verifikasi data.

H. Uji Kreadibilitas Data

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2013:270-276) antara lain:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Perpanjangan pengamatan ini juga berarti hubungan peneliti dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Berapa lama perpanjangan

pengamatan ini dilakukan, akan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar, berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membacaberbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasidokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan.

3. Triangulasi

Melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada

informasi yang disembunyikan lagi. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya fokuskan pada pengujian terhadap data yang diperoleh, apakah data yang dicek kelapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

4. Analisis kasus negative Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai dengan hasil.

Penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.

5. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. contoh, data hasil

wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif (kamera, handycam, alat rekam suara) sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Mengadakan *Member check*

Member check adalah proses pengecekan data yang di peroleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang di peroleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti data tersebut valid, sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak di sepakati oleh pemberi data, maka peneliti harus melakukan diskusi dengan pemberi data.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, Edisi Kelima. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2018. *Kebijakan Publik*, Edisi Kedua. Bandung: Pustaka Setia.
- Anonim. 2019. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Pasar Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Dewi, Kusuma. 2022. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Fadjarajani, Siti. Et al. 2020. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisiplin*. Gorontalo: Ideal Publishing.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik Evaluasi, Reformasi, dan Formulasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*, Edisi Pertama. Bandung: Pustaka Setia.
- Igirisa, Irawaty. 2022. *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*, Edisi Pertama. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Julian. 2021. Manajemen Pengelolaan Dana Revitalisasi Danau Tondano Oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa (Studi Kasus Di Balai Wilayah Sungai Sulawesi). *Governance* Vol.1, No. 2, hlm 1-10.
- Mahendra, F.D. 2023. Pengelolaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Desa Kelinjau Ulu Kecamatan Muara Ancalong. *Administrasi Publik* Vol. 11, No. 1, hlm 113-125.
- Marwiyah, Siti. 2022. *Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksana, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. t.t: CV. Mitra Ilmu.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan Dan Penulisan Skripsi*. Amuntai: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.
- Utami, Sari dan Syaparuddin. 2019. *Islam & Pasar Tradisional*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Winarto, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Edisi Pertama,. Yogyakarta: CAPS.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.